



**Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA)
Di Kabupaten Pandeglang**

Syamsu Hilal, Ma'mun Sarma, dan Lukman M. Baga

**Strategi Peningkatan Penerimaan Pendapatan Pajak Reklame
Di Kabupaten Bogor**

Indah Ayu Sulviane, Harianto, dan Dedi Budiman Hakim

**Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Bogor Melalui Pendekatan
Anggaran Dan Regulasi**

Yusuf Dardiri, Sri Hartoyo, dan Ma'mun Sarma

**Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan
Di Provinsi Banten**

Alla Asmara dan Stannia Cahaya Suci

**Mekanisme Kolaborasi Untuk Peningkatan Kapasitas Masyarakat
Dalam Program Kebun Bibit Rakyat Di Kabupaten Pohuwato**

Ivana Butolo, Lukman M. Baga, dan Irdika Mansur

**Pengembangan Komoditas Ekspor Ikan Hias Air Tawar Dan Kaitannya
Dengan Pembangunan Ekonomi Di Kabupaten Bogor**

Hesty Dharmanita Wianggawati, Muhammad Firdaus, dan Anna Fariyanti

Valuasi Ekonomi Dampak Kemacetan Lalu-Lintas Di DKI Jakarta

Yusman Syaukat, Ma'mun Sarma, A. Faroby Falatehan, dan Rizal Bahtiar

Pengembangan Biodiesel Kelapa Sawit Di Indonesia

A. Faroby Falatehan dan A. Dwi Siswanto



Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah (MPD) adalah media ilmiah penyebaran utama hasil-hasil penelitian sosial - ekonomi dalam lingkup pembangunan daerah dengan misi meningkatkan pengetahuan dan keterampilan profesional serta pemberi informasi bagi pengambil kebijakan, praktisi dan pemerhati pembangunan daerah. Jurnal MPD terbit perdana April 2009, Jurnal MPD diterbitkan dua kali dalam satu tahun oleh Program studi Manajemen Pembangunan Daerah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB bekerjasama dengan Perhimpunan Ilmu Ekonomi Pertanian Indonesia (PERIEPI).

Jurnal MPD. Volume 6 Nomor 1, Juni 2014

Penanggung Jawab

Dr. Ir. Ma'mun Sarma, MS, M.Ec

(Ketua Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor)

Dewan Redaksi

Ketua : Dr. Ir. Lukman M Baga, MA.Ec

Anggota : A. Faroby Falatehan, SP, ME

Hendra Khaerizal, SP, M.Si

Reviewer

Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, M.Ec

Prof. Dr. Ir. Sumardjo, MS

Prof. Dr. Ir. Bustanul Arifin, MSc

Dr. Ir. Yasman Syaikat, M.Ec

Dr. Ir. Parulian Hutagaol, MS

Dr. Ir. Lala M Kolopaking, MS

Dr. Ir. Ernan Rustadi, M.Agr

Dr. Ir. Hanawan Hariyoga, MSc

Dr. Ir. H. M. Ikhwanudin Maward, Msc

Redaksi Pelaksana

Rini Nurmayanti, S.Pi

Fieta Resnia Handayani, A.Md

Alamat Redaksi

Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah

Fakultas Ekonomi dan Manajemen - Institut Pertanian Bogor

Jl. Kamper Wing 5 Level 4, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680.

Tlp/Fax: +62-251-862-9342. Mobile: +62-852-1842-6205

E-mail: mpdipb@hotmail.com, Website: www.mpd.ipb.ac.id

ARTIKEL

- STRATEGI PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS (LKMA) DI KABUPATEN PANDEGLANG**
Syamsu Hilal, Ma'mun Sarma, dan Lukman M. Baga 1 - 13
- STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN PENDAPATAN PAJAK REKLAME DI KABUPATEN BOGOR**
Indah Ayu Sulviame, Harianto, dan Dedi Budiman Hakim 14 - 29
- STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA BOGOR MELALUI PENDEKATAN ANGGARAN DAN REGULASI**
Yusuf Dardiri, Sri Hartoyo, dan Ma'mun Sarma 30 - 40
- PENGARUH KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI BANTEN**
Alla Asmaria dan Stannia Cahaya Suci 41 - 53
- MEKANISME KOLABORASI UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT DALAM PROGRAM KEBUN BIBIT RAKYAT DI KABUPATEN POHUWATO**
Isana Butolo, Lukman M. Baga, dan Irdika Mansur 54 - 69
- VALUASI EKONOMI DAMPAK KEMACETAN LAJU-LINTAS DI DKI JAKARTA**
Yusman Syaukat, Ma'mun Sarma, A. Faroby Falatehan, dan Rizal Bahitior 70 - 81
- PENGEMBANGAN KOMODITAS EKSPOR IKAN HIAS AIR TAWARDAN KAITANNYA DENGAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI KABUPATEN BOGOR**
Hesty Dharmanita Wianggawati, Muhammad Firdaus, dan Anna Furiyanti 82 - 96
- PENGEMBANGAN BIODIESEL KELAPA SAWIT DI INDONESIA**
A. Faroby Falatehan dan A. Dwi Siswanto 97 - 104

STRATEGI PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS (LKMA) DI KABUPATEN PANDEGLANG

Development Strategy of Agribisnis Microfinance Institution (LKMA) in Pandeglang District

Syamsu Hilal¹, Ma'mun Sarma², dan Lukman M. Baga³

¹Staff Khusus Bidang Kelembagaan Kementerian Pertanian RI. E-mail: syamsu.hilal@yahoo.co.id

²Staff Pengajar Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. E-mail: mamun_sarma@yahoo.com.

³Staff Pengajar Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. E-mail: lukmanmb@yahoo.com

ABSTRACT

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) is institutional economics in rural area in which the combined members of farmers' group. Based on the Regulation of the Minister of Agriculture, Gapoktan can perform economic functions. To more effectively manage the funds of PUAP, Gapoktan directed to develop Agribusiness Microfinance Institutions (AMFI). Growth and expansion in Gapoktan PUAP AMFI is strategic step to resolve the question of the financing of small farmers and agricultural laborers during this difficult to get financial services through formal financial institutions and banking. Therefore, the formation AMFI purpose is to: (1) provide assurance services and farmers easier access to financing facilities, (2) a simple and fast procedure, (3) the proximity of the location of the service with the efforts of farmers, (4) operator of AMFI very understanding of the character of farmers as customers. Central government and local government continued to encourage the formation of AMFI on Gapoktan PUAP. The existence AMFI certainly to be hoped by poor farmers in Pandeglang District. The Sum of Gapoktan that has been gained PUAP program until 2012 is 257 Gapoktan. This amount is equivalent to 76.72 percent of the total village in Pandeglang District. However, the number of successful AMFI until 2012 only 16 AMFI (6.23%). Total AMFI is certainly not expected. Therefore, this study discusses the performance Gapoktan PUAP, evaluate the process of the formation of the AMFI on Gapoktan PUAP, and analyze the performance of AMFI. The study and analysis of the material to formulate a development strategy AMFI in Pandeglang District.

Keywords: Gapoktan, PUAP, LKMA

ABSTRAK

Gapoktan adalah kelembagaan ekonomi di pedesaan yang di dalamnya bergabung beberapa kelompok tani. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian, Gapoktan dapat melakukan fungsi-fungsi ekonomi. Untuk lebih mengefektifkan pengelolaan dana PUAP, Gapoktan membentuk Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA). Penumbuhan dan pengembangan LKMA di dalam Gapoktan PUAP merupakan langkah strategis untuk menyelesaikan persoalan pembiayaan petani kecil dan buruh tani yang selama ini sulit mendapatkan pelayanan keuangan melalui lembaga keuangan formal dan perbankan. Oleh karena itu, tujuan pembentukan LKMA adalah untuk; (1) memberikan kepastian pelayanan serta kemudahan akses petani terhadap fasilitas pembiayaan; (2) prosedur yang sederhana dan cepat; (3) kedekatan lokasi pelayanan dengan tempat usaha petani; (4) pengelola LKMA sangat memahami karakter petani sebagai nasabah. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terus mendorong terbentuknya LKMA pada Gapoktan PUAP. Keberadaan LKMA tentu sangat diharapkan oleh petani miskin di Kabupaten Pandeglang. Jumlah Gapoktan yang telah mendapatkan program PUAP hingga tahun 2012 sebanyak 257 Gapoktan. Jumlah ini setara dengan 76,72 persen dari jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Pandeglang. Namun demikian, jumlah LKMA yang berhasil dibentuk hingga tahun 2012 sebanyak 16 LKMA (6,23%). Jumlah LKMA tersebut tentu tidak sesuai harapan. Oleh karena itu, kajian ini membahas tentang kinerja Gapoktan PUAP, mengevaluasi proses pembentukan LKMA pada Gapoktan PUAP, dan menganalisis kinerja LKMA. Hasil kajian dan analisis tersebut menjadi bahan untuk merumuskan strategi pengembangan LKMA di Kabupaten Pandeglang.

Kata Kunci: Gapoktan, PUAP, LKMA

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional melalui kontribusinya dalam pembentukan modal, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bio-energi, penyerap tenaga kerja, sumber devisa negara, sumber pendapatan masyarakat, serta berperan dalam pelestarian lingkungan melalui praktik budidaya pertanian yang ramah lingkungan (Kementerian Pertanian, 2012). Namun demikian, pembangunan sektor pertanian belum mampu mengentaskan kemiskinan di perdesaan secara efektif.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada September 2012 jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11,66%). Dari jumlah tersebut, sekitar 18,08 juta orang (14,70%) penduduk miskin berada di perdesaan dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian. Sedangkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pandeglang menurut Indikator Kesejahteraan Rakyat Pandeglang (2011) adalah 127.800 orang atau 11,14 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Pandeglang.

Salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi petani adalah kurangnya akses terhadap sumber permodalan. Petani sebagai pengguna kredit menginginkan skema kredit yang tidak mensyaratkan agunan; prosedur pengajuan kredit tidak terlalu sulit; pinjaman dalam bentuk uang; dan disalurkan sesuai dengan kebutuhan petani dan tepat waktu (Lembaga Penelitian SMERU, 2002).

Untuk menjawab permasalahan tersebut, tahun 2008 Kementerian Pertanian menggulirkan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Setiap Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) PUAP menerima bantuan dana bergulir (*revolving*

fund) sebesar Rp 100 juta. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan PUAP, Gapoktan didampingi oleh tenaga Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani (PMT).

Jumlah Gapoktan PUAP di Kabupaten Pandeglang hingga tahun 2012 sebanyak 257 Gapoktan. Jika dibandingkan dengan jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Pandeglang, persentase Gapoktan PUAP mencapai 76,72 persen. Dari 257 Gapoktan PUAP, jumlah Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) yang berhasil ditumbuhkan dalam periode tahun 2008 – 2012 hanya berjumlah 16 LKMA (6,23%) (Kementerian Pertanian, 2013).

Setelah LKMA berhasil ditumbuhkan, pekerjaan yang harus dilakukan selanjutnya adalah menjaga kinerja LKMA tersebut agar dapat berfungsi secara baik dan berkesinambungan. Di Kabupaten Pandeglang, jumlah LKMA yang sudah tidak aktif lagi sebanyak 6 LKMA (37,50%). Berdasarkan hal itu, penelitian ini difokuskan untuk menghasilkan Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA).

Parameter keberhasilan kinerja Gapoktan PUAP diukur dari kemampuan lembaga tersebut dalam menyalurkan, mengelola, dan mengembangkan dana PUAP, sehingga terjadi pertumbuhan dana PUAP dari waktu ke waktu. Untuk menjalankan fungsi tersebut, Gapoktan harus memiliki organisasi yang kuat. Oleh karena itu, penting untuk dianalisis: Bagaimana kinerja Gapoktan dalam pengelolaan dana PUAP?

Sedikitnya jumlah LKMA yang berhasil ditumbuhkan pada Gapoktan PUAP di Kabupaten Pandeglang memunculkan pertanyaan: Bagaimana proses penumbuhan LKMA pada Gapoktan penerima dana PUAP? Padahal Kementerian Pertanian telah menerbitkan buku Pedoman Penumbuhan LKMA pada Gapoktan PUAP dan beberapa buku pedoman pendukungnya.

Sedangkan untuk LKMA yang sudah terbentuk diharapkan dapat menyelesaikan persoalan pembiayaan petani skala mikro dan buruh tani yang jumlahnya cukup besar di perdesaan. Pada sisi inilah peran LKMA akan terlihat setelah dilakukan kajian untuk menemukan jawaban atas pertanyaan: Bagaimana kinerja LKMA dalam pengembangan program PUAP.

Hasil analisis kinerja Gapoktan, evaluasi penumbuhan LKMA, dan kajian terhadap kinerja LKMA di Kabupaten Pandeglang diharapkan dapat dijadikan acuan untuk merumuskan: **Strategi pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA).**

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kinerja Gapoktan dalam pengelolaan dana PUAP; (2) mengevaluasi proses penumbuhan LKMA pada Gapoktan penerima dana PUAP; (3) mengkaji kinerja LKMA pada Gapoktan penerima dana PUAP; dan (4) merumuskan strategi pengembangan LKMA sebagai lembaga permodalan usaha petani.

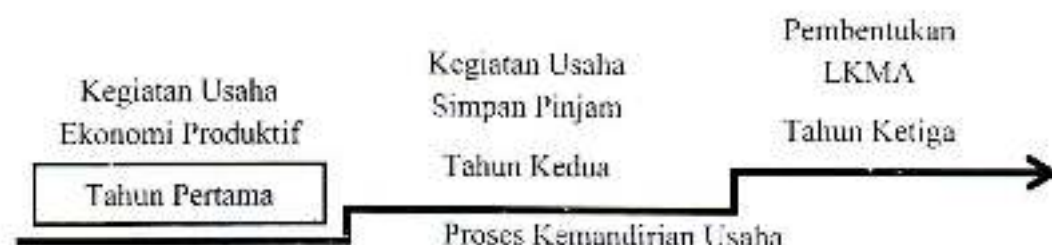
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: (1) Kementerian Pertanian sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan strategi penumbuhan LKMA pada PUAP, (2) Gapoktan untuk mendukung peningkatan kinerja LKMA, (3) Lembaga keuangan/perbankan dan perusahaan yang ingin bekerjasama dalam pembangunan pertanian melalui penguatan LKMA, (4) Pembaca sebagai sumber

literatur dan perbandingan dalam penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

TINJAUAN PUSTAKA

PUAP merupakan program pemberdayaan Kementerian Pertanian yang dilaksanakan oleh Gapoktan dengan memberikan fasilitasi bantuan modal usaha untuk petani. Struktur inti PUAP terdiri dari Gapoktan, Penyuluh Pendamping, dan PMT. Secara Nasional, sejak tahun 2008 hingga tahun 2012, jumlah Gapoktan yang memperoleh dana PUAP sebanyak 44.173 Gapoktan dengan kucuran dana lebih dari Rp4,4 triliun. Apabila dikelola dengan baik, dana tersebut seharusnya dapat mengurangi petani miskin dan menurunkan angka pengangguran di perdesaan. Sedangkan jumlah PMT pada tahun 2012 sebanyak 1.318 orang (Kementerian Pertanian, 2013).

Sesuai proses pembinaan kelembagaan PUAP, tahun pertama dana PUAP dimanfaatkan untuk membiayai usaha produktif sesuai dengan Rencana Usaha Anggota (RUA), Rencana Usaha Kelompok (RUK), dan Rencana Usaha Bersama (RUB). Tahun kedua, Gapoktan mengembangkan Usaha Simpan Pinjam. Dan tahun ketiga, Gapoktan membentuk LKMA. Proses pembinaan kelembagaan PUAP disajikan pada Gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Tahapan Proses Pembinaan Kelembagaan PUAP
 Sumber: Kementerian Pertanian (2012)

Seibel (1998) mendefinisikan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai lembaga keuangan formal dan non-formal yang menyediakan layanan simpanan mikro, kredit mikro, investasi mikro, dan asuransi mikro untuk mengembangkan layanan untuk usaha ekonomi mikro. Dalam Undang-undang Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, LKM didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Berdasarkan terminologi tersebut, LKMA dapat

dikatakan sebagai LKM yang khusus bergerak di bidang agribisnis.

LKMA merupakan lembaga yang dibentuk untuk mengelola dana PUAP secara bergulir (*revolving fund*). Dengan demikian, petani pemanfaat berkewajiban mengembalikan dana tersebut kepada LKMA untuk kemudian digulirkan kembali kepada petani lain di dalam Gapoktan yang bersangkutan. Proses penumbuhan LKMA pada Gapoktan PUAP melalui 5 tahapan, yaitu; identifikasi; validasi profil Gapoktan; seleksi kelayakan dan potensi LKMA; transformasi unit usaha permodalan Gapoktan menjadi LKMA; dan implementasi dan pengembangan LKMA.

Kerangka Pemikiran



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Pandeglang, Banten. Alasan dipilihnya Kabupaten Pandeglang karena kabupaten tersebut memiliki jumlah LKMA terbanyak se Provinsi Banten. Selain itu, jumlah penduduk miskin di Kabupaten

Pandeglang merupakan yang terbesar di Provinsi Banten. Penelitian lapangan dilakukan pada bulan Juli–September 2013.

Jenis dan Sumber Data

Data sekunder, khususnya yang menyangkut data mengenai LKMA dan Gapoktan diperoleh dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi

Banten, dan Direktorat Pembiayaan Kementerian Pertanian. Data primer diperoleh dari hasil wawancara terstruktur dengan responden yang berasal dari Gapoktan dan LKMA sampel, PMT, pejabat dari Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang, pejabat dari BPTP Provinsi Banten, dan pejabat Kementerian Pertanian. Selain melalui wawancara, data primer juga diperoleh melalui *Focus Group Discussion* (FGD).

LKMA sampel ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel secara sengaja, yaitu 8 LKMA dari 16 LKMA di Kabupaten Pandeglang berdasarkan tahun PUAP, jenis usaha dominan, dan legalitas LKMA. Jumlah responden yang diwawancarai sebanyak 106 orang.

Metode Analisis

Analisis kinerja Gapoktan PUAP, evaluasi proses penumbuhan LKMA pada Gapoktan PUAP, dan kajian terhadap kinerja LKMA dalam pengembangan program PUAP dilakukan secara deskriptif kuantitatif. Bobot nilai atas setiap jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepada

responden menggunakan skala *Likert* (5, 4, 3, 2, 1) atau *Binner* (1 dan 0). Sedangkan untuk perumusan strategi pengembangan LKMA menggunakan *Analytic Hierarchy Process* (AHP).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kinerja Gapoktan PUAP

Penilaian kinerja Gapoktan PUAP menggunakan 4 indikator, yaitu; (1) kelembagaan dan organisasi; (2) penyaluran dana PUAP; (3) pengembangan dana PUAP; dan (4) kerjasama Gapoktan dengan lembaga lain dalam pengelolaan dana PUAP. Penilaian terhadap keempat indikator kinerja tersebut menggunakan skala *Likert* (sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan buruk) dengan bobot nilai masing-masing berturut-turut 5, 4, 3, 2, 1. Responden yang mengisi kuesioner sebanyak 7 orang untuk masing-masing Gapoktan, yaitu PMT, ketua, sekretaris, dan bendahara Gapoktan, serta 3 orang anggota Gapoktan yang bersangkutan. Tabel kinerja Gapoktan PUAP disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kinerja Gapoktan PUAP di Kabupaten Pandeglang Tahun PUAP 2008 - 2010

No	Nama Gapoktan	Tahun PUAP	Kinerja				Rata-rata
			Kelembagaan dan Organisasi	Penyaluran Dana PUAP	Pengembangan Dana PUAP	Kerjasama dengan Lembaga lain	
1	Pelita	2010	3,37	3,17	2,91	2,54	3,00
2	Karang Sari	2009	2,84	2,57	1,57	2,00	2,25
3	Curug Barang Indah	2010	3,50	3,83	3,33	2,75	3,35
4	Sinar Cempaka	2008	4,45	4,33	3,77	3,67	4,06
5	Sinar Wangi	2010	3,64	4,53	3,33	2,71	3,55
6	Mitra Ta'awan	2009	3,38	3,61	2,47	2,33	2,95
7	Desa Cikeusik	2009	4,52	4,72	4,03	2,58	3,96
8	Jubut Mandiri	2009	3,47	3,26	3,17	3,29	3,30
Rata-rata Total			3,65	3,75	3,07	2,73	3,65

Sumber: Data Primer, 2013 (diolah)

Hasil evaluasi terhadap kinerja 8 Gapoktan PUAP di Kabupaten Pandeglang menyimpulkan bahwa kinerja kelembagaan dan organisasi, kinerja penyaluran dana PUAP, dan

Pengembangan dana PUAP memperoleh nilai baik. Hal itu dapat dilihat dari nilai rata-rata total lebih besar dari 3. Namun, di sisi lain, kinerja kerjasama dengan lembaga lain memperoleh nilai kurang

baik (2,73). Kondisi ini mengisyaratkan bahwa keberlanjutan (*sustainability*) pengelolaan dana PUAP oleh Gapoktan akan menemui hambatan, karena Gapoktan kurang mampu menjalin kerjasama dengan lembaga lain, baik dalam hal penguatan modal usaha, maupun pemasaran hasil produksi pertanian.

Evaluasi Penumbuhan LKMA pada Gapoktan PUAP

Parameter penumbuhan LKMA pada Gapoktan PUAP adalah; (1) pemeringkatan Gapoktan menuju LKMA; (2) hambatan pengembangan LKMA; (3) upaya solusi terhadap hambatan pengembangan LKMA; (4) tahap persiapan pembentukan LKMA; (5) pemenuhan persyaratan administrasi kelembagaan LKMA; (6) tahap pelaksanaan LKMA; dan (7) tahap pengembangan usaha oleh LKMA.

Untuk tahapan nomor 1 dan 3, pembobotan nilai menggunakan skala *Likert* (sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan buruk) dengan bobot nilai masing-masing berturut-turut 5, 4, 3, 2, 1. Tahapan nomor 2 juga menggunakan skala *Likert* (sangat berat, berat, cukup berat, ringan, tidak ada) dengan bobot nilai yang sama. Sedangkan tahapan nomor 4 – 7 pembobotan nilai menggunakan skala

Biner (1 untuk ada atau dilaksanakan, dan 0 untuk tidak/belum ada atau tidak dilaksanakan).

Responden yang mengisi kuesioner pada evaluasi penumbuhan LKMA berjumlah 3 orang, masing-masing dari BPTP Provinsi Banten, Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang, dan PMT. Hasil evaluasi penumbuhan LKMA terhadap 8 Gapoktan PUAP tahun 2008 – 2010 di Kabupaten Pandeglang disajikan pada Tabel 2.

Hasil evaluasi terhadap penumbuhan LKMA terhadap 8 Gapoktan penerima PUAP di Kabupaten Pandeglang menyimpulkan bahwa pada tahap-tahap awal pembentukan LKMA semua Gapoktan yang dibantu oleh Penyuluh Pendamping dan PMT berupaya keras untuk mewujudkan terbentuknya LKMA. Hal itu ditunjukkan oleh proses pemeringkatan Gapoktan PUAP menjadi LKMA yang dilaksanakan dengan baik (3,19); hambatan pembentukan LKMA pada Gapoktan PUAP yang tidak terlalu berat (2,85); upaya mengatasi hambatan pembentukan LKMA yang dilakukan dengan baik (3,23); dan persiapan pembentukan LKMA berjalan baik (0,94).

Tabel 2. Hasil Evaluasi Penumbuhan LKMA terhadap 8 Gapoktan PUAP Tahun 2008 – 2010 di Kabupaten Pandeglang

No	Nama Gapoktan	Nilai Terhadap Proses Penumbuhan LKMA						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Pelita	3,54	2,70	3,29	0,93	0,20	0,67	0,86
2	Karang Sari	2,72	3,15	3,21	0,93	0,20	0,43	0,62
3	Curug Berang Indah	2,82	2,88	2,88	0,93	0,13	0,38	0,76
4	Sinar Cempaka	3,33	2,27	3,29	0,93	0,67	0,62	0,52
5	Sinar Wangi	3,74	3,06	3,13	0,93	0,27	0,43	0,52
6	Mitra Ta'awun	2,64	3,03	2,96	0,93	0,13	0,24	0,81
7	Desa Cikusak	3,64	2,79	3,33	0,93	0,33	0,43	0,48
8	Jubut Mandiri	3,08	2,94	3,71	1,00	0,00	0,86	0,62
Rata-rata Total		3,19	2,85	3,23	0,94	0,24	0,51	0,65

Sumber: Data Primer, 2013 (diolah)

Keterangan:

- 1 = Pemeringkatan Gapoktan PUAP menjadi LKMA
- 2 = Hambatan pembentukan LKMA pada Gapoktan PUAP
- 3 = Upaya solusi terhadap hambatan pembentukan LKMA

- 4 = Tahap persiapan pembentukan LKMA
- 5 = Persyaratan administrasi LKMA
- 6 = Tahap pelaksanaan LKMA
- 7 = Tahap pengembangan usaha LKMA

Namun, ketika memasuki tahap pelaksanaan dan persiapan pengembangan LKMA, upaya tersebut mengalami penurunan. Hal itu ditunjukkan oleh rendahnya nilai pemenuhan persyaratan administrasi/legalitas LKMA (0,24), pelaksanaan LKMA (0,51), dan pembentukan unit usaha LKMA (0,65). Kondisi ini sangat mengancam keberlanjutan LKMA ke depan.

Kinerja LKMA pada Pengembangan Program PUAP

Meskipun data kinerja keuangan 8 LKMA di Kabupaten Pandeglang yang berhasil dihimpun hanya menggambarkan tentang jumlah anggota Gapoktan/LKMA pada awal penerimaan PUAP, jumlah

anggota LKMA pada tahun 2012, jumlah akumulasi dana LKMA pada tahun 2012, dan jumlah kredit macet, tetapi data tersebut sudah cukup menggambarkan tentang buruknya kinerja keuangan LKMA di Kabupaten Pandeglang. Hal itu terutama ditunjukkan oleh tingginya persentase kredit macet (*Non Performing Loan/NPL*) yang rata-rata mencapai 62,2 persen. Angka ini jauh di atas angka NPL yang ditetapkan Bank Indonesia, yaitu sebesar 5 persen. Berdasarkan hal tersebut, 8 LKMA di Kabupaten Pandeglang perlu mendapat pengawasan intensif dan pendampingan secara frekuentif. Data kinerja keuangan 8 LKMA di Kabupaten Pandeglang disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Kinerja Keuangan 8 LKMA Tahun 2008 – 2010 di Kabupaten Pandeglang

No	Nama LKMA	Tahun PUAP	Jumlah Anggota (orang)			Kinerja Keuangan				
			Awal	2012	Δ	Awal (Rp. juta)	2012 (Rp. 000)	Δ (Rp)	Kredit Macet (Rp)	% Kredit Macet
1	Pelita	2010	30	300	270	100	112.846.000	12.846.000	67.707.600	60,0
2	Karang Sari	2009	60	116	56	100	133.417.000	33.417.000	70.000.000	52,5
3	Corug Barang Indah	2010	91	200	109	100	106.047.500	6.047.500	106.047.500	100,0
4	Sinar Cempaka	2008	70	81	11	100	100.919.000	919.000	15.137.850	15,0
5	Sinar Wangi	2010	96	171	75	100	107.805.000	7.805.000	43.122.000	40,0
6	Mitra Ta'awun	2009	75	75	0	100	104.968.090	4.968.090	104.968.090	100,0
7	Desa Cikeusik	2009	200	471	271	100	140.647.920	40.647.920	70.323.960	50,0
8	Jubut Mandiri	2009	75	120	45	100	128.087.500	28.087.500	102.470.000	80,0
Jumlah			697	1.534	837	800	934.738.010	134.738.010	579.777.000	62,2

Sumber: Direktorat Pembiayaan, Kementan (2013) dan Data Primer (2013) diolah.

Berdasarkan Tabel 4, faktor yang paling berpengaruh terhadap terjadinya kredit macet adalah kurangnya kesadaran anggota dalam membayar pinjaman (3,58) dan kegagalan usaha (3,53). Rendahnya kesadaran anggota dalam melunasi pinjaman diakui, baik oleh pengurus LKMA maupun anggota LKMA itu sendiri.

Tabel 4. Faktor Penyebab Kredit Macet

No.	Faktor Penyebab	Nilai
1	Kurangnya kesadaran anggota dalam membayar pinjaman	3,58
2	Kegagalan usaha	3,53
3	Tidak ada insentif dan sanksi terhadap pelanggaran	3,51
4	Lemahnya penegakkan disiplin organisasi	3,32
5	Kurangnya pengawasan/kontrol oleh manajemen	3,32
6	Tidak ada aturan yang jelas	3,02
7	Penyimpangan penggunaan dana oleh anggota	2,77

Sumber: Data Primer, 2013 (diolah)

Meski demikian, bila dilihat dari jangkauan (*outreach*), yaitu kemampuan pelayanan LKMA terhadap masyarakat miskin di lingkungannya, 87,50 persen LKMA memiliki kinerja yang baik. Selama kurang lebih tiga tahun, jumlah anggota yang dilayani LKMA bertambah sebanyak 837 orang (120,09%), dari 697 orang menjadi 1.534 orang.

Di samping itu keberadaan LKMA di perdesaan diakui manfaatnya oleh petani. Hasil penelitian di lapangan menyimpulkan bahwa dana PUAP dirasakan dapat meningkatkan kesejahteraan anggota (4,19), adanya skema pinjaman dana yang mudah dan ringan (4,13), membebaskan anggota dari jerat rentenir (4,13), dan dapat meningkatkan pendapatan anggota (4,10). Meskipun tujuan keuangan (*financial objective*) LKMA belum tercapai secara baik, namun tujuan sosial (*social objective*) LKMA dapat dicapai dengan baik.

Buruknya kinerja keuangan LKMA di Kabupaten Pandeglang disebabkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan LKMA (Tabel 5). Faktor yang paling berpengaruh terhadap kegagalan LKMA adalah kurangnya pemahaman tentang LKMA (3,66) dan kurangnya kesadaran anggota (3,62). Akibat kurangnya pemahaman tentang LKMA, banyak anggota LKMA yang memahaminya sebagai dana hibah yang tidak perlu dikembalikan. Kurangnya kesadaran anggota dalam melunasi pinjaman juga dapat disebabkan karena lemahnya pemahaman mereka tentang LKMA.

Tabel 5. Faktor Penyebab Kegagalan LKMA di Kabupaten Pandeglang

No	Faktor Penyebab	Nilai
1	Kurangnya pemahaman tentang LKMA	3,66
2	Kurangnya kesadaran anggota	3,62
3	Kelemahan kepemimpinan/manajemen	3,47
4	Kurangnya pengawasan	3,32
5	Kurangnya fasilitas/prasarana dan sarana manajemen	3,08
6	Penyimpangan data oleh manajemen	2,96

Sumber: Data Primer, 2013 (diolah)

Penelitian ini juga mengungkap beberapa faktor pendukung keberhasilan LKMA (Tabel 6). Faktor yang paling kuat terhadap keberhasilan LKMA adalah kesadaran anggota (4,57), peran Penyuluh Pendamping (4,42), dan peran PMT (4,42). Hal ini menunjukkan betapa pentingnya penumbuhan kesadaran anggota untuk kesuksesan LKMA. Kesadaran anggota dapat ditumbuhkan secara cepat dengan optimalnya peran pendampingan oleh Penyuluh Pendamping dan PMT.

Tabel 6. Faktor pendukung Keberhasilan LKMA

No.	Faktor Keberhasilan LKMA	Nilai
1	Kesadaran anggota	4,57
2	Penyuluh pendamping	4,42
3	Penyelia Mitra Tani	4,42
4	Ketegasan pemimpin	4,32
5	Fasilitas/prasarana dan sarana manajemen	4,28
6	Peran Tim PUAP Pusat/BPTP	4,25
7	Peran Tim Teknis Tingkat Kabupaten	4,23

Sumber: Data Primer, 2013 (diolah)

Strategi Pengembangan LKMA

Di antara faktor penting dalam strategi pengembangan LKMA adalah konsep LKMA, kelayakan (*viability*) LKMA, keswadayaan, kemandirian keuangan, jangkauan pasar (*outreach*), dan profitabilitas. Dari hasil perhitungan AHP terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap strategi pengembangan LKMA, menurut responden faktor profitabilitas memiliki nilai tertinggi (0,268). Profitabilitas adalah kemampuan LKMA dalam menghasilkan keuntungan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Hasil perhitungan AHP untuk Faktor disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Hasil Perhitungan AHP untuk Faktor

No	Faktor	BPTP	Dinas	PMT	LKMA	Kementan	Nilai
1	Konsep LKMA	0,025	0,041	0,290	0,370	0,073	0,160
2	Kelayakan	0,145	0,142	0,287	0,052	0,105	0,146
3	Keswadayaan	0,132	0,176	0,330	0,209	0,080	0,185
4	Kemandirian Keuangan	0,079	0,137	0,050	0,164	0,181	0,122
5	Jangkauan Pasar	0,155	0,317	0,016	0,032	0,075	0,119
6	Profitabilitas	0,464	0,188	0,027	0,173	0,486	0,268

Sumber: Data Primer, 2013 (diolah)

Aktor dalam pembentukan LKMA ditentukan oleh tiga pihak, yaitu Pemerintah, PMT, dan Gapoktan. Hasil perhitungan AHP untuk Aktor menyimpulkan bahwa Gapoktan dianggap memiliki peranan yang sangat penting bagi

pembentukan LKMA (0,512), diikuti PMT (0,296), dan pemerintah (0,187). Hasil perhitungan AHP untuk Aktor disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Hasil Perhitungan AHP untuk Aktor

No	Aktor	BPTP	Dinas	PMT	LKMA	Kementan	Nilai
1	Pemerintah	0,287	0,193	0,200	0,111	0,143	0,187
2	PMT	0,394	0,421	0,412	0,111	0,143	0,296
3	Gapoktan	0,310	0,369	0,389	0,778	0,714	0,512

Sumber: Data Primer, 2013 (diolah)

Kelima responden menyatakan bahwa pemerintah dianggap kurang berperan dalam pembentukan LKMA. Sedangkan BPTP, Dinas, dan PMT menyatakan peran utama dalam pembentukan LKMA adalah PMT. LKMA dan Kementan menilai peran utama dalam pembentukan LKMA adalah Gapoktan. PMT dan LKMA masing-masing menilai diri mereka merupakan aktor utama dalam pembentukan LKMA.

Menurut responden apabila LKMA hendak diwujudkan, maka pendanaan dan kemitraan harus diprioritaskan dibanding dengan dua faktor lainnya. Di antara keempat variabel tersebut, dua variabel mendominasi, yaitu pendanaan (0,317) dan kemitraan (0,310). Perhitungan AHP untuk Tujuan pembentukan LKMA disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Hasil Perhitungan AHP untuk Tujuan Pembentukan LKMA

No	Tujuan	BPTP	Dinas	PMT	LKMA	Kementan	Nilai
1	Legalitas	0,074	0,144	0,231	0,057	0,325	0,166
2	Kelembagaan	0,165	0,138	0,456	0,061	0,198	0,204
3	Pendanaan	0,475	0,434	0,069	0,455	0,153	0,317
4	Kemitraan	0,272	0,284	0,244	0,427	0,325	0,310

Sumber: Data Primer, 2013 (diolah)

Strategi Alternatif yang paling utama untuk diterapkan pada pengembangan LKMA adalah peningkatan produksi dan pemasaran hasil pertanian (0,306) dan penguatan pembiayaan (0,290). Hasil Perhitungan AHP untuk

Strategi Alternatif pengembangan LKMA disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Hasil Perhitungan AHP untuk Strategi Pengembangan LKMA

No	Strategi	BPTP	Dinas	PMT	LKMA	Kementan	Nilai
1	Regulasi LKMA	0,250	0,163	0,263	0,032	0,063	0,154
2	Pendampingan LKMA	0,308	0,229	0,244	0,087	0,313	0,236
3	Penguatan Pembiayaan	0,201	0,346	0,342	0,246	0,313	0,290
4	Produksi dan Pemasaran Hasil	0,169	0,261	0,153	0,634	0,313	0,306

Menurut BPTP strategi utama pengembangan LKMA adalah pendampingan; menurut Dinas dan PMT, penguatan pembiayaan; menurut LKMA strategi yang terpenting adalah produksi dan pemasaran hasil; dan menurut Kementan pendampingan, penguatan pembiayaan, produk, dan pemasaran hasil merupakan strategi yang sama penting.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kinerja Gapoktan PUAP di Kabupaten Pandeglang secara umum baik pada aspek kelembagaan dan organisasi, penyaluran dana PUAP, dan pengembangan dana PUAP. Sedangkan kinerja pada aspek kerjasama dengan lembaga lain, kurang baik. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa keberlanjutan (*sustainability*) pengelolaan dana PUAP oleh Gapoktan akan menemui hambatan, karena Gapoktan kurang mampu menjalin kerjasama dengan lembaga lain, baik dalam hal penambahan modal usaha, maupun pemasaran hasil produksi pertanian.
2. Penumbuhan LKMA pada Gapoktan PUAP berjalan baik pada tahapan persiapan. Sedangkan pada tahapan pelaksanaan dan persiapan pengembangan LKMA, hasil kurang baik. Kondisi ini akan melemahkan peran LKMA ketika hendak menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan mikro.
3. Meskipun kinerja Gapoktan pada aspek pengembangan dana PUAP adalah baik, sebagaimana ditunjukkan oleh perkembangan dana PUAP yang

semakin meningkat, akan tetapi tingginya angka kredit macet yang mencapai 62,2 persen akan mengancam keberlangsungan LKMA ke depan.

4. Beberapa faktor penting yang harus diperhatikan dalam strategi pengembangan LKMA di Kabupaten Pandeglang adalah penegasan aspek profitabilitas dalam pembentukan LKMA, peningkatan kualitas SDM Gapoktan dan pengelola LKMA, peningkatan peran PMT dalam pendampingan, penguatan pendanaan dan kemitraan, serta peningkatan produksi dan fasilitasi pemasaran hasil produksi.

Saran

1. Untuk melahirkan LKMA yang kuat, hendaknya Tim PUAP Pusat (BPTP Provinsi Banten), Tim Teknis Kabupaten (Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang), Penyuluh Pendamping, dan PMT harus meningkatkan koordinasi dan komunikasi secara intensif. Keputusan pembentukan LKMA hendaknya tidak didelegasikan kepada salah satu dari *stakeholders*, dalam hal ini PMT.
2. Peran pendampingan terhadap LKMA hendaknya tidak hanya dibebankan kepada PMT, karena perbandingan antara jumlah PMT dengan Gapoktan/LKMA yang ada di Kabupaten Pandeglang adalah 1:30. Peran pendampingan dapat melibatkan Penyuluh dan Penyuluh Pendamping.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade N.S., Elva, dan Najmi A. 2009. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pelaksanaan PUAP Tidak Berjalan dengan Baik Ditinjau dari Sisi Pemerintah dan Petani Pelaksana. Institut Pertanian Bogor.
- Arsyad, Lincoln. 2008. Lembaga Keuangan Mikro; Institusi, Kinerja, dan Sustainability. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Ashari. 2009. Optimalisasi Kebijakan Kredit Program Sektor Pertanian Di Indonesia. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 7 No. 1, Maret 2009: 21 – 42.
- Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. 2010. Rencana Strategis Tahun 2010 – 2014 Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian. Jakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang. 2011. Indikator Kesejahteraan Rakyat Pandeglang. Pandeglang.
- Badan Pusat Statistik. 2013. Profil Kemiskinan di Indonesia September 2012. Berita Resmi Statistik No. 06/01/Th. XVI, 2 Januari 2013. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. 2012. Profil Kemiskinan di Banten September 2012. Berita Resmi Statistik Provinsi Banten No. 04/01/36/Th. VII, 2 Januari 2013
- Berenbach, Shari . 1997. Regulation and Supervision of Microfinance Institutions, Case Studies Edited by Craig Churchill, The Micro Finance Network Occasional Paper No. 2.
- Burhansyah, Rusli. 2010. Pemberdayaan Gapoktan PUAP Kalimantan Barat Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Petani di Pedesaan. EPP Vol. 7 No.2. 2010: 1-5.
- Boysen, Victoria and Richard Sahlberg. 2008. The Key Success Factors of Grameen Bank – A Case Study of Strategic, Cultural and Structural Aspects. School of Economics and Management, Lund University, Sweden.
- Departemen Pertanian. 2006. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Jakarta.
- Departemen Pertanian. 2007. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007, Tanggal 13 April 2007 Tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani. Jakarta.
- Departemen Pertanian. 2009. Modul Konsep Dasar dan Organisasi Unit Pengelolaan Keuangan Mikro (UPKM) Gapoktan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Jakarta.
- Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Kementerian Pertanian. 2012. Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Jakarta.
- Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian. 2011. Daftar Gapoktan Penerima Dana BLM-PUAP Tahun 2008 dan 2009 yang Telah Mempunyai Unit Usaha LKMA. Jakarta.
- Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian. 2012. Pedoman Penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) Gapoktan PUAP. Jakarta.
- Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian. 2011. Pedoman

- Pemeringkatan Gapoktan PUAP Menjadi LKMA. Jakarta.
- Djohanputro, Bramantyo dan Ronny Kountur. 2007. *Non Performing Loan (NPL) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)*, Laporan Penelitian Diserahkan kepada GTZ dan Bank Indonesia.
- Gay, L.R. *Educational research*. 1976. Columbus, Ohio: Charles E. Merrill Publishing Co.
- Guntz, Sarah. 2011. Sustainability and Profitability of Microfinance Institutions. Research Paper in International Finance and Economics. Center for Applied International Finance and Development (CAIFD), Georg Simon OHM, University of Applied Sciences Nuremberg.
- Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat. 2007. Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Jakarta.
- Kementerian Pertanian. 2008. Kebijakan Teknis Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan. Jakarta.
- Kementerian Pertanian. 2011. Petunjuk Teknis Penyelia Mitra Tani (PMT) Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Jakarta.
- Kementerian Pertanian. 2011. Petunjuk Teknis Penyuluh Pendamping Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Jakarta.
- Kementerian Pertanian. 2011. Lampiran Peraturan Menteri Pertanian, No: 29/Permentan/OT.140/5/2011, Tanggal: 30 Mei 2011 tentang Pedoman Penilaian Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) - Berprestasi Tahun Anggaran 2011. Jakarta.
- Lembaga Penelitian SMERU. 2001. Kredit Pertanian Setelah KUT. No.4: Sep-Nov/2001. Jakarta.
- Lembaga Penelitian SMERU. 2002. Pendanaan UsahataniPadi Pasca KUT, Kredit Ketahanan Pangan (KKP). Jakarta
- Marulanda, Bcatriz, *et al.* 2010. Taking the Good from the Bad in Microfinance: Lessons Learned from Failed Experiences in Latin America. Calmeadow.
- Norell, Dan. 2001. How To Reduce Arrears In Microfinance Institutions. Journal of Microfinance Volume 3 Number 1.
- Pusat Pembiayaan Pertanian, Kementerian Pertanian. 2008. Pengembangan dan Pola Penilaian Kelembagaan PUAP. Jakarta.
- Pusat Pengembangan Pelatihan Pertanian, Badan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian. 2008. Pedoman Umum Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian tahun 2008. Jakarta.
- Pusat Pengembangan Pelatihan Pertanian, Badan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian. 2009. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pelatihan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Jakarta.
- Pusat Pengembangan Pelatihan Pertanian, Badan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian. 2010. Petunjuk Teknis (Juknis) Petunjuk Teknis Penyelia Mitra Tani (PMT). Jakarta.
- Suci Anita, Andi dan Umi Salawati. 2011. Analisis Pendapatan Penerima Bantuan Langsung Masyarakat-Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (BLM-PUAP) di Kabupaten Barito Kuala. Jurnal Agribisnis Perdesaan Volume 01 Nomor 04 Desember 2011.
- Sudaryanto, Tahlim, *et al.* 2009. Penentuan Lokasi dan Evaluasi Kinerja serta Dampak Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP). Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Departemen Pertanian. Jakarta.

- Susila, Ihwan. 2007. Analisis Efisiensi Lembaga Keuangan Mikro. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 8, No. 2, Desember 2007, hal. 223 – 242.
- Syahyuti.2007. Kebijakan Pengembangan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sebagai Kelembagaan Ekonomi Di Perdesaan. *Analisis Kebijakan Pertanian*, Volume 5 No. 1, Maret 2007: 15-35.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.